ABSTRAKSI

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan rumah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahaan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh Rumah. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Konsep *3 in 1 in the land acquisition* merupakan cara pandang untuk mempermudah pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan masyarakat dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, dimana konsep ini mencoba hadir untuk menghadapi berbagai masalah yang ada pada pengadaan tanah untuk MBR, akan tetapi dalam pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengaplikasianya tetap menggunakan konsep yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam peraturan pemerintah nomor 64 Tahun 2016, sedangkan konsep *3 in 1 in the land acquisition* ini adalah istilah untuk mempermudah pemahaman terkait pengadaan tanah untuk umum, bukan untuk penerapan dalam pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Perumahan MBR, Kepastian Hukum.

ABSTRACTION

Housing is a collection of houses as part of settlements, both urban and rural, which are equipped with infrastructure, facilities, and public utilities as a result of efforts to fulfill livable homes. Whereas the house based on the provisions of Article 1 point 7 of Government Regulation Number 14 of 2016 is a building that functions as a habitable residence, a means of fostering a family, a reflection of the dignity of its inhabitants, and assets for its owner. The provisions of Article 1 number 31 of Government Regulation No. 14 of 2016 concerning the Organization of Houses and Settlement Areas state that Low-Income Communities, hereinafter abbreviated as MBR, are people who have limited purchasing power so that the Government needs support to obtain a House. The government is obliged to meet the needs of homes for Low-Income Communities.

The concept of 3 in 1 in the land acquisition is a way of looking at facilitating the understanding of agencies that need land and communities in land acquisition activities for development in the public interest, where this concept tries to be present to deal with various problems in land acquisition for MBR, but in the housing development of low-income people in their applications still uses the concepts contained in legislation, especially in government regulations number 64 of 2016, while the 3 in 1 concept in the land acquisition is a term to facilitate understanding regarding public land acquisition, not for implementation in housing development of low-income communities.

Keywords: Land Acquisition, MBR Housing, Legal Certainty.